Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	2

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	
Media Online	Radar Solo

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Komisi C DPRD Jawa Tengah Dorong Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/08/08/2022/komisi-c-dprd-jawa-tengah-dorong-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor/

SRAGEN – DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak segera dilakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp 1,8 triliun. Hal itu untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Sriyanto Saputro menyampaikan, tunggakan pajak kendaraan Jawa Tengah sempat mencapai Rp 2 triliun. Namun setelah Komisi C berkomunikasi dengan Bappeda dan diteruskan ke Samsat seluruh kabupaten/kota, turun menjadi Rp 1,8 triliun setelah dilakukan penarikan.

"Kondisi ini selalu menjadi temuan dari BPK. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kendala di lapangan. Banyak kendaraan yang seharusnya sudah dihapuskan masih terdaftar," terangnya, Senin (8/8).

Sriyanto menambahkan, tahun ini harus dilakukan validasi data menyeluruh. Sehingga diketahui potensi yang bisa didapatkan. Misalnya saat ini tunggakan di Sragen Rp 26 miliar, setelah validasi nilainya tidak sebesar itu.

Informasi dari korlantas, lanjut dia, kendaraan yang telat pajak dua tahun akan diblokir. Langkah tersebut sebagai antisipasi. Karena kewajiban pemilik kendaraan bermotor membayar pajak. Sehingga data dan angka terkait potensi pajak semakin valid.

Selain itu pada akhir tahun, akan ada pemutihan pajak kendaraan bermotor. Serta balik nama gratis untuk kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah.

"Inovasi semacam ini harus terus dilakukan. Kemudian *door-to-door* yang dilakukan teman-teman satap ke Jawa Tengah untuk mendata dan menagih," ujarnya.

Dia mendorong dilakukan pemutihan pajak kendaraan. Program tersebut dinilai meringankan beban masyarakat. Kemudian terbantu untuk validasi data.

"Mending angka riil. Dari pada angkanya besar, tapi *nggak* ada duitnya. Karena mungkin motor sudah tidak difungsikan," ujarnya.

Soal pelaksanaan dari pemprov terkait pemutihan belum ada pengumuman. Namun dia memastikan setiap tahun pasti diadakan pemutihan pajak kendaraan. Apalagi beberapa waktu lalu, masyarakat juga terdampak pandemi. Sehingga pemutihan pajak sangat diperlukan.

"*Nggak* lama lagi, gubernur akan menyampaikan pengumuman," ujarnya.

Sedangkan mutasi balik nama gratis yang masuk ke Jawa Tengah merupakan potensi pajak. Semisal kendaraan dari Jakarta, diarahkan ke Jawa. Kemudian ada potensi pajak ke Jawa tengah. **(din/adi/dam)**